

**ANALISIS KESESUAIAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI WILAYAH KPHP MODEL SINTUWUMAROSO DESA KILO
KECAMATAN POSO PESISIR UTARA****Bernid Mebunde¹⁾, Adam Malik²⁾, Imran Rachman²⁾**

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta Km.9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

¹⁾ Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas TadulakoKorespondensi: bhernit_mebunde@yahoo.co.id²⁾ Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako**Abstract**

Indonesia is rich of forest since years ago strongly interacted with forest, the forest and human have become unity. Many human needs can be fulfilled by forest such as housing, clothing, food, medicines, and environment service. Forest management is done to provide benefits for society generally and for people surroundings particularly. The benefits can be performed through planning and management optimally as the forest functions. The right determination of forest management is done to make forest useful optimally for the society either directly or indirectly. The regulation No. 41 Year 1999 stipulating that forming area of forest management of levels such as province, city, and unit namely forest management unit (KPH) as the main functions and to destiny for. The implementation of forest management in KPH become the fulfillment to conduct forest management covering forest arrangements activity, government effort emphasizing regulation is the publishing of government regulation No. 6/2007 jo PP 3 Year 2008 about Forest Arrangement, Forest Management Planning, and Forest Utilization explaining KPH covering Conservation KPH (KPHK), Preservation KPH (KPHL), and Production KPH (KPHP). The research was conducted at Society Forest of Kilo Village, Poso Pesisir Utara Sub district of Poso Regency. It was from June to August 2014. The data source obtained were observation and interview which directly observe the object examined and asking and answering by using questions guidance formed questionnaire. The result indicates that the location of biophysical condition is very exactly to utilize for forest production not plants forest wood with rubber types because it can give ecology benefits for environment improvement and re-optimizing forest function. The development of HKM formed society empowerment in Kilo village is as suitable with the economy social of society because make benefits for society income

Key Wods: Analysis, Development, Society Forest, KPHP

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Rencana pengelolaan hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, di susun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari (PP No.42 Tahun 2010).

Zaitunah (2004) dalam Rahmawaty (2006) mengemukakan bahwa perencanaan hutan

merupakan tahapan penting dari pengelolaan hutan lestari. Perencanaan yang baik menjadikan pengelolaan hutan dapat dilakukan secara terarah dan terkendali, baik dalam awal pengelolaan hutan maupun kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Menurut Septi (2008) dalam Malajuna (2013), tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan amanat UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai bagian dari

unit pengelolaan diartikan sebagai kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien dan lestari (Firdaus, 2012).

Unit-unit pengelolaan hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tergantung pada fungsi hutan dominan yang terdapat dalam kawasan (Kementerian Kehutanan 2011).

Pembentukan KPH tersebut dimaksudkan agar pengelolaan hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu alternatif pemanfaatan kawasan hutan produksi dan diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi kawasan hutan negara terutama fungsinya untuk kelestarian hutan dan mensejahterakan masyarakat.

Kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara, saat ini telah terindikasi mengalami kerusakan akibat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan pemanfaatan hutan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan tidak mengubah fungsi pokoknya.

Rumusan Masalah

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sintuwu Maroso ini memiliki kawasan seluas 137.859 ha meliputi: Hutan Lindung (HL) seluas 46.484ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 28.734 ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 62.516 ha yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Poso. Sebagian besar hutan produksi yang ada di wilayah KPHP Sintuwu Maroso merupakan hutan sekunder yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian pengembangan hutan kemasyarakatan di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengembangan hutan kemasyarakatan di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2014. Lokasi penelitian merupakan kawasan hutan yang telah dirambah dan diokupasi oleh masyarakat, yang berada di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sintuwu Maroso Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta KPHP Model Sintuwu Maroso, dan panduan pertanyaan dalam bentuk kuisisioner. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera dan alat tulis menulis.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi aktual di lapangan, baik kondisi biofisik hutan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masuk kedalam anggota KTH Citra Padopi, melalui metode wawancara mendalam.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai penunjang dari data primer.

a. Data primer terdiri dari data-data kondisi aktual di lapangan seperti jenis vegetasi

dan penutupan lahan di kawasan hutan produksi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pemanfaatan kawasan (lahan) hutan di sekitar maupun di dalam kawasan hutan produksi oleh masyarakat, jenis pekerjaan atau mata pencaharian, tingkat pendapatan responden, tingkat pendidikan responden dan luas lahan yang dimiliki responden.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai penunjang data primer, yang terdiri dari keadaan umum lokasi penelitian, peta kawasan hutan KPHP Model Sintuwu Maroso, rencana pengembangan hutan kemasyarakatan pada KPHP Model Sintuwu Maroso, data curah hujan, topografi, jenis tanah, dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari akses internet, kunjungan perpustakaan, maupun dari instansi terkait lainnya.

Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi secara terminologis dimaknai sebagai pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi merupakan teknik pengumpulan data paling utama dalam penelitian (Kaelan, 2012).

Metode observasi ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, meliputi pengamatan terhadap kondisi aktual di lapangan yang terdiri dari pengamatan terhadap kondisi biofisik hutan produksi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara.

- b. Wawancara

Menurut Nasir, (2003) dalam Juslianty, (2012), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan bahan yang dinamakan panduan pertanyaan dalam bentuk kuisisioner.

Dalam melakukan wawancara, penentuan responden dipilih dengan menggunakan metode *Snowball Sampling* (teknik bola salju). *Snowball Sampling* merupakan salah satu metode penentuan responden yang dilakukan secara berantai (multi level) artinya peneliti mengumpulkan informasi dari salah satu responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti yaitu Ketua KTH

Citra Padopi, selanjutnya dari responden tersebut peneliti akan menentukan responden berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden terdahulu. Adapun responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah anggota KTH Citra Padopi di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Bungin (2011) mengemukakan bahwa dalam suatu *survey* penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi penelitian.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis perbandingan. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Nazir (2003) dalam Juslianty (2012), tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Analisis perbandingan digunakan untuk melihat kesesuaian hasil penelitian dengan rencana pengembangan hutan kemasyarakatan di wilayah KPHP model Sintuwu Maroso Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Setelah data dari lapangan (kondisi biofisik kawasan hutan produksi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat) terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas (*survey* dan wawancara), serta data-data pendukung yang terkait dengan tujuan penelitian maka data tersebut selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian pengembangan hutan kemasyarakatan di Wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo dianalisis menggunakan dua parameter pengamatan, yaitu potensi biofisik lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan

kemasyarakatan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Hasil dan analisis kesesuaian pengembangan hutan kemasyarakatan diuraikan sebagai berikut.

Potensi Biofisik

Untuk mengetahui potensi biofisik, dilakukan pengamatan terhadap jenis vegetasi dan kondisi penutupan lahan melalui survei langsung pada lokasi pengembangan hutan kemasyarakatan. Untuk jenis tanah, dan topografi di peroleh dari hasil analisis peta lahan kritis wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso dari BP-DAS Palu Poso. Sementara itu untuk kondisi curah hujan dan suhu di peroleh dari BMKG Kasiguncu.

Kondisi Jenis Vegetasi

Jenis vegetasi yang ditemukan di lokasi penelitian terdiri dari kakao, alpokat, durian, kopi, kelapa, gamal, mangga dan pisang.

Keberadaan vegetasi terutama pepohonan sangat jarang ditemukan di lokasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, di antaranya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat setempat.

Kondisi Penutupan Lahan

Kondisi penutupan lahan/vegetasi di wilayah KPHP Sintuwu Maroso berdasarkan hasil interpretasi citra tahun 2012 menggunakan citra landsat 7 ETM tahun 2007-2012, citra Alos dan citra GeoEye, diketahui luas hutan lahan kering primer (Hp) 20.677,00 Ha, Hutan lahan kering sekunder (Hs) seluas 84.719,00 Ha, Semak/Belukar (B) seluas 4.299,00 Ha, Pertanian lahan kering (Pt) seluas 10.228,00 Ha, Pertanian lahan kering bercampur dengan semak (Pc) seluas 8.822,00 Ha, dan Tanah terbuka (T) seluas 1.733,00 Ha.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan di lokasi penelitian yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan sebagian besar kondisi penutupan lahannya adalah perkebunan masyarakat dengan jenis tanaman kakao dan beberapa tanaman perkebunan lainnya di antara tanaman kakao seperti kopi, kelapa pisang dan lain sebagainya. Penggunaan lahan hutan dengan tutupan lahan perkebunan di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan menggambarkan bahwa lokasi ini telah lama dirambah atau diokupasi

sekelompok orang untuk penggunaan non kehutanan. Hal ini disebabkan keberadaan ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Jenis Tanah, Topografi dan Ketinggian

Berdasarkan data FAO/UNESCO/Soil Survey Staff (1968), penyebaran jenis di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Propinsi Sulawesi Tengah jenis tanah yang ada berdasarkan sistem taksonomi tanah (Soil Survey Staff USDA, 1999), ditemukan dua order utama diantaranya *Entisols* (*Hydraquents*), dan *Inceptisols* (*Endaquepts*, *Haplusteps*). Ordo *Entisols* menempati wilayah dataran/lembah dengan variasi sifat-sifat kimia tanah yang cukup beragam, sedangkan *Inceptisols* penyebarannya cukup luas dengan variasi sifat-sifat tanah yang relatif kecil. Demikian juga Ordo *Inceptisols* dengan *Great Group Endaquepts*, bahan induknya aluvium, dataran aluvium, dataran aluvial, dengan relief datar.

Berdasarkan klasifikasi tanah LPT Bogor, jenis tanah yang terdapat di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah didominasi jenis Podsolik merah kuning. Jenis tanah lainnya adalah mediteran merah kuning, aluvial dan litosol.

Berdasarkan hasil analisis peta lahan kritis BP-DAS Palu Poso, jenis tanah yang terdapat di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso didominasi jenis podsolik merah kuning dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah mediteran merah kuning dan litosol, aluvial, non calcic brown dan litosol. Dan untuk jenis tanah di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo adalah podsolik merah kuning dan litosol.

Ketinggian wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso berkisar antara 230m–2.247m di atas permukaan laut, dan untuk ketinggian lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo adalah 245m di atas permukaan laut.

Curah Hujan dan Suhu

Curah hujan Kabupaten Poso periode tahun 2009-2013 berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Kasiguncu diketahui bahwa curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2748,86 mm/thn. Suhu maksimum/minimum berdasarkan data Stasiun Meteorologi

Kasiguncu Tahun 2009-2013 berada pada 28,6°C dan 26,3°C dengan rata-rata 27,56°C.

Kondisi Sosial Ekonomi Responden

Jenis Pekerjaan atau Mata Pencapaian

Berdasarkan hasil Observasi di lapangan dan wawancara terhadap responden diketahui semua responden dengan jenis pekerjaan sebagai petani. Selain itu pola nafkah yang terjadi di lokasi penelitian adalah pola nafkah ganda dalam artian responden selain pekerjaan utama sebagai petani juga melakukan pekerjaan lain seperti buruh tidak tetap dalam rangka menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Tingkat Pendapatan Responden

Berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian terhadap responden dengan mata pencapaian petani, pada umumnya mereka enggan memperhitungkan antara penghasilan yang diperoleh dengan biaya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, tingkat pendapatan responden memiliki perbedaan dan kesamaan antara responden satu dengan responden yang lainnya. Tingkat pendapatan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tingkat pendapatan responden

| Tingkat pendapatan (Rp) | Jumlah Responden | (%) |
|-------------------------|------------------|--------------|
| <500.000 | 2 | 10 |
| 500.000 – 1.000.000 | 9 | 40 |
| >1.000.000 – 1.500.000 | 4 | 20 |
| >1.500.000 | 5 | 25 |
| Total | 20 | 100 % |

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pendapatan responden didominasi oleh tingkat pendapatan Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.000.000 perbulan dengan tingkat persentase 45%, disusul tingkat pendapatan lebih dari Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000 perbulan dengan persentase 25%, kemudian tingkat pendapatan lebih dari lebih dari Rp. 1.500.000 dan tingkat pendapatan kurang dari Rp.500.000 perbulan dengan persentase 10%.

Hasil di atas memperlihatkan bahwa jumlah pendapatan keluarga dapat berpengaruh terhadap kegiatan pembukaan lahan hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kilo hanya mengandalkan mata

pencapaian dari sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini yang mempengaruhi atau mendorong masyarakat untuk membuka lahan di dalam kawasan hutan. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat tak luput dari keberadaan ekonomi masyarakat yang masih bergantung terhadap sumberdaya hutan.

Tingkat Pendidikan Responden

Keadaan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah KPHP Sintuwu maroso umumnya didominasi tingkat sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar. Kondisi seperti ini juga dijumpai di lokasi penelitian yaitu Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, keadaan tingkat pendidikan responden di Desa Kilo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

| Tingkat pendapatan (Rp) | Jumlah Responden | (%) |
|-------------------------|------------------|--------------|
| Tidak tamat SD | 1 | 5 |
| Tamatan SD | 10 | 50 |
| Tamatan SMP/ sederajat | 6 | 30 |
| Tamatan SMA/ sederajat | 3 | 15 |
| Total | 20 | 100 % |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa keadaan pendidikan responden di lokasi penelitian umumnya didominasi oleh tingkat tamatan SD dengan persentase 50%, disusul tingkat tamatan SMP 30%, tidak tamat SD 5% dan tamat SMA 15%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di lokasi penelitian masih sangat rendah. Sesuai dengan wawancara dengan ketua kelompok tani hutan (KTH) Citra Padopi bahwa tingkat pendidikan rata-rata anggota kelompok tani (KTH) Citra Padopi didominasi oleh tingkat pendidikan tamatan SD. Kondisi pendidikan yang seperti ini tentunya akan berpengaruh langsung terhadap pembukaan lahan hutan oleh masyarakat, dimana masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah lebih cenderung untuk membuka lahan di dalam hutan seperti membuka lahan untuk ditanami kakao dan tanaman pertanian lainnya.

Luas Kepemilikan Lahan dan Pemanfaatan Lahan Oleh Responden

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang telah dilakukan di lokasi penelitian,

diketahui bahwa responden yang bermukim di Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara yang masuk dalam kelompok tani hutan (KTH) Citra Padopi, pada umumnya responden memiliki lahan garapan 4 ha–9 ha per KK.

Sementara itu pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kilo pada umumnya adalah untuk usaha perkebunan kakao tanaman pangan lainnya.

Dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara dapat dikatakan bahwa beberapa kategori di atas mempunyai pengaruh terhadap tindakan masyarakat dalam mengokupasi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan.

Analisis Rencana Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Lokasi pengembangan hutan kemasyarakatan di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo, sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan Kabupaten Poso dan peta wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso berada pada kawasan hutan produksi terbatas dengan luas areal 154,58 ha. Lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo adalah hutan produksi di wilayah Desa Kilo yang telah dirambah oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Kilo memanfaatkan kondisi lingkungan yang subur dan baik untuk bercocok tanam tanpa memperhatikan dampak yang nantinya akan dihadapi oleh anak cucu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap kondisi biofisik yaitu jenis vegetasi dan penutupan lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dilihat dari beberapa aspek yaitu jenis pekerjaan atau mata pencaharian, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, luas kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan oleh responden atau masyarakat di Desa Kilo, bahwa rencana pengembangan hutan kemasyaraktan di lokasi yang sudah dirambah oleh masyarakat sangat tepat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan mengupayakan untuk mengakomodir secara optimal peran masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan dengan tujuan dapat mengoptimalkan

kembali fungsi hutan dan dapat menunjang ekonomi masyarakat sehingga pengelolaan hutan lestari untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Hal ini yang membuat KPHP Model Sintuwu Maroso merasa wajib untuk melakukan suatu kegiatan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan di dalam hutan produksi yang telah dirambah dan diokupasi oleh masyarakat.

Terhadap lahan-lahan hutan yang telah lama diolah dan digunakan oleh penduduk setempat dalam bercocok tanam usaha tani seperti kakao serta tanaman semusim diupayakan dilakukan pembinaan secara intensif dengan tetap mengedepankan hak-hak mereka selaku pengguna lahan hutan. Pemberdayaan masyarakat di wilayah KPHP Sintuwu Maroso dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan, serta pemberian areal hak pengelolaan lahan hutan secara khusus di wilayah KPHP. Selain itu, pemberian areal hak pengelolaan lahan dalam wilayah KPHP dimungkinkan karena sejak puluhan tahun silam telah melakukan usaha perkebunan masyarakat setempat.

Pengembangan hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat setempat. Sasaran lokasi pengembangan HKM diantaranya adalah lahan-lahan hutan yang saat ini telah dirambah dan okupasi oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Salah satu kegiatan yang sementara dilakukan dalam hal pemberdayaan masyarakat oleh KPHP Model Sintuwu Maroso pada hutan kemasyarakatan di Desa

Kilo adalah melalui kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dalam PP 37 tahun 2007, dijelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Dalam hal pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan kemasyarakatan di Desa Kilo dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan tanaman. Hutan tanaman merupakan hutan yang dibangun dan dikelola melalui permudaan buatan atau penaburan/penanaman bibit pohon dengan sengaja. Winarto B. (2006), bahwa hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada hutan kemasyarakatan di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso di Desa Kilo agar masyarakat perambah hutan dapat teralihkannya perhatian untuk tidak memperluas areal atau wilayah perambahan. Faktor ini harus didukung dengan sosialisasi dan penyadaran akan pentingnya keberadaan hutan bukan untuk saat ini saja tapi untuk generasi mendatang.

Langkah awal KPHP Model Sintuwu Maroso dalam hal pemberdayaan bagi masyarakat adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya keberadaan hutan baik sekarang ataupun pada masa yang akan datang serta membentuk suatu Kelompok Tani Hutan (KTH) Citra Padopi. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kilo yang masuk dalam KTH Citra Padopi, mereka setuju dengan pengembangan HKm di wilayah ini, dan mereka juga setuju pembentukan kelompok tani hutan ini yang dikhususkan bagi masyarakat perambah serta mereka juga setuju dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman. Pembentukan KTH Citra Padopi adalah untuk menciptakan suatu bentuk kerja sama antara KPHP Model Sintuwu Maroso sebagai pihak pertama dan KTH Citra Padopi sebagai pihak kedua. Dengan adanya hubungan kerja sama ini

dinilai akan mempermudah kegiatan pembinaan kepada masyarakat perambah dan penguatan kelembagaan KTH itu sendiri.

Sesuai dengan wawancara terhadap masyarakat Desa Kilo yang masuk dalam anggota KTH Citra Padopi, mereka setuju dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman di areal perambahan mereka dengan melakukan *interplanting* tanaman kehutanan dengan tanaman perkebunan masyarakat, asalkan mereka tetap bisa melanjutkan usaha kebunnya. Masyarakat juga merasa diperhatikan pemerintah, terutama dalam pembentukan KTH ini yang kemudian akan dibina oleh KPHP itu sendiri. Sesuai hasil wawancara terhadap anggota KTH Citra Padopi mereka setuju dengan pembinaan yang dilakukan oleh KPHP Model Sintuwu Maroso. Beberapa kegiatan dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh KPHP Model Sintuwu Maroso diantaranya adalah memberi bimbingan teknis baik diminta ataupun tidak diminta, memberi bantuan tenaga pendamping terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberi bantuan benih/bibit tanaman hutan serta memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KTH Citra Padopi.

Dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada HKm di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Desa Kilo, KPHP Model Sintuwu Maroso menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan ini, dimana untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh KTH itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KTH itu sendiri seperti pembuatan persemaian yang dibuat di lokasi/areal penanaman dinilai dapat menimbulkan rasa memiliki dan tidak ada biaya pengangkutan dan mengurangi resiko stres pada tanaman yang dapat mengakibatkan kematian bibit.

Sesuai hasil wawancara di lokasi penelitian dengan KTH Citra Padopi, dalam kegiatan melakukan *interplanting* tanaman kehutanan di antara tanaman perkebunan yaitu dengan pola *Agroforestry*. Salah satu fungsi *agroforestry* pada level bentang lahan yang sudah terbukti diberbagai tempat adalah kemampuannya untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam yang tersedia, khususnya terhadap

kesesuaian lahan. Sistem *agroforestry* pada umumnya dapat mempertahankan sifat-sifat fisik lapisan tanah atas sebagaimana pada sistem hutan (Widianto dkk, 2003).

Dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman pada HKM di wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso jenis tanaman yang direncanakan untuk di tanam di lokasi pengembangan hutan kemasyarakatan adalah jenis tanaman karet. Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat Desa Kilo yang masuk dalam KTH Citra Padopi mereka setuju jika jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan tanaman adalah jenis tanaman karet.

Pengusahaan tanaman karet ini merupakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di pandang sebagai pemanfaatan biomassa hutan sebagai pabrik biomassa. Hasil hutan bukan kayu seperti getah dapat dimanfaatkan secara lestari tanpa menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem hutan yang berat (Departemen Kehutanan, 2007).

Pemilihan jenis tanaman karet didasarkan atas kesepakatan bersama antara KPHP Model Sintuwu Maroso sebagai pihak pertama dan masyarakat Desa Kilo yang masuk dalam KTH sebagai pihak kedua. Pemilihan jenis tanaman karet yang akan ditanam di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo dinilai dapat bernilai ekologi dan ekonomi.

Tanaman karet adalah tanaman tahunan dan merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan banyak komponen yang terbuat dari karet (Maria.N.I, 2013).

Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks. Menurut Kasmudjo (2011), getah karet dapat diperoleh melalui upaya penyiapan dan diteruskan dengan perlakuan koagulasi (penggumpalan) serta perlakuan-perlakuan lainnya. Untuk dapat tumbuh dengan optimal dan menghasilkan produktivitas lateks yang baik, tanaman karet memiliki persyaratan tumbuh yang baik. persyaratan tumbuh karet yang baik sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan tempat tumbuh. Iklim dan tempat tumbuh yang baik untuk tanaman karet agar dapat tumbuh

optimal hingga menghasilkan lateks

Tanaman karet tumbuh optimal pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan antara 2.000 mm hingga 2.500 mm per tahun. Suhu optimal yang diperlukan tanaman berkisar antara 25°C hingga 30°C. Suhu harian lebih dari 30°C akan mengakibatkan tanaman karet tidak akan dapat tumbuh dengan baik.

Tanaman karet dapat tumbuh diberbagai jenis tanah, kendatipun hanya dapat tumbuh optimal pada lahan dengan tanah dari jenis vulkanis dan alluvial. Pada dasarnya tanaman karet tumbuh optimal pada daerah dataran rendah dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut sampai dengan 400 meter di atas permukaan laut (Damanik S, dkk, 2010).

Berdasarkan data yang didapat mengenai jenis tanah, ketinggian, curah hujan dan suhu, dibandingkan dengan syarat tumbuh karet yang baik dapat dilihat pada tabel 3.

| Iklim dan tempat tumbuh | Hasil yang didapat | Syarat tumbuh yang baik | Keterangan |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Curah Hujan | 2748,86 mm/tahun | 2000 - 2500 mm/tahun | Kurang Sesuai |
| Suhu | 27,56°C | 25°C hingga 30°C | Sesuai |
| Jenis Tanah | podsolik merah kuning dan litosol | vulkanis dan alluvial | Kurang sesuai |
| Ketinggian | 240 m dpl | 200-400 m dpl | Sesuai |

Berdasarkan tabel 3, sesuai dengan syarat tumbuh yang baik untuk tanaman karet, bahwa wilayah Indonesia yang beriklim tropis sangat baik untuk pertumbuhan karet. Curah hujan optimal untuk pertumbuhan tanaman karet adalah 2000 mm/tahun sampai dengan 2500 mm/tahun.

Berdasarkan hasil yang didapat dari BMKG Kasiguncu bahwa curah hujan rata-rata di wilayah Kabupaten Poso selama 5 tahun terakhir (2009 -2013) adalah 2748,86 mm/tahun. Dibandingkan dengan syarat tumbuh yang baik untuk tanaman karet, hasil ini dapat dikatakan kurang sesuai untuk dengan syarat tumbuh karet yang baik terutama untuk mendukung produktivitasnya dalam menghasilkan lateks.

Selanjutnya berdasarkan kajian literatur, suhu optimal yang baik untuk pertumbuhan karet sesuai dengan syarat tumbuh karet yang baik adalah 25°C hingga 30°C. Berdasarkan data yang didapat dari BMKG Kasiguncu bahwa suhu di wilayah Kabupaten Poso selama 5 tahun terakhir (2009–2013) maksimum/minimum adalah 28,6°C hingga 26,3°C dengan rata-rata 27,56°C. Berdasarkan hasil yang didapat, dibandingkan dengan syarat tumbuh karet yang baik, dapat dikatakan bahwa suhu di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan tanaman di Desa Kilo sesuai dengan syarat tumbuh karet yang baik terutama dalam mendukung produktivitasnya untuk menghasilkan lateks.

Untuk jenis tanah yang ada di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo adalah jenis podsolik merah kuning dan litosol. Jenis tanah ini tidak terlalu baik untuk tempat tumbuh karet. Jenis tanah yang sangat baik untuk tananaman karet sesuai dengan syarat tempat tumbuh karet yang baik adalah jenis vulkanis muda dan alluvial. Hal ini karena jenis vulkanis mempunyai sifat fisik yang cukup baik terutama tekstur, struktur, kedalaman lapisan tanah (solum), kedalaman air tanah, aerasi, dan drainase dibanding dengan jenis tanah podsolik merah kuning dan litosol yang lebih baik dari sifat kimianya dibanding sifat fisiknya, hal ini dikarenakan tanaman karet pada umumnya lebih mempersyaratkan keadaan tanah dari sifat fisiknya dibandingkan sifat kimianya, disebabkan karena sifat fisik tanah lebih sulit diperbaiki dibandingkan dengan sifat kimia.

Tempat tumbuh karet dengan jenis tanah podsolik merah kuning dan litosol di lokasi pengembangan HKm di Desa Kilo dibandingkan dengan syarat tumbuh karet yang baik dikatakan kurang sesuai karena dapat mengakibatkan pertumbuhan karet akan lebih lambat dibandingkan dengan jenis tanah vulkanis.

Ketinggian tempat dari permukaan laut sesuai syarat tumbuh karet yang baik berada pada 200 meter dari permukaan laut sampai dengan 400 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut kurang baik untuk pertumbuhan tanaman karet karena semakin tinggi tingkat ketinggian maka pertumbuhan karet akan semakin lambat. Ketinggian lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan di Desa Kilo sesuai hasil yang didapat berada pada ketinggian 245 meter dari permukaan laut. Ketinggian lokasi yang direncanakan untuk pengembangan HKm di Desa Kilo dapat mengakibatkan pertumbuhan karet dibandingkan dengan ketinggian untuk syarat tumbuh karet yang baik dapat dikatakan sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi biofisik lokasi sangat tepat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman dengan jenis tanaman karet karena dapat memberi manfaat ekologi untuk perbaikan lingkungan dan mengoptimalkan kembali fungsi hutan.
2. Pengembangan HKm dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kilo sangat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena dapat memberi manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus. A.Y., 2012. *Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Hak Akses Masyarakat Terhadap Hutan*. Working Group On Forest-Land Tenure.
- Departemen Kehutanan, 2007. *Pembangunan Kehutanan Menuju Hutan Lestari*. Biro Perencanaan dan Keuangan
- Bungin, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Damanik. 2010. *Budidaya dan Pasca Panen Karet*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Bogor.
- Juslianty, 2012. *Analisis Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Model Dampelas-Tinombo. Desa Kambayang Kecamatan Dampelas*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Palu.
- Kaelan, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma. Yogyakarta
- Kasmudjo, 2011. *Hasil Hutan Non Kayu*. Cakrawala Media. Yogyakarta.
- Malajuna, 2013. *Potensi Tegakan Hutan Tanaman Unggulan Lokal Di desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, Palu.
- Kementerian Kehutanan, 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan*. Konsep Peraturan Perundangan dan Implementasi. Jakarta
- Maria N.I, 2013. *Karya Tulis: Teknik Pembuatan Bahan Tanam Karet Unggul Dalam Rangka Revitalisasi Karet Indonesia*. Surabaya.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007. *Hutan Kemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42 Tahun 2010. *Sistim Perencanaan Kehutanan*.
- Rahmawaty, 2006. *Perencanaan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.
- Widianto dkk, 2003. *Fungsi dan Peran Agroforestri*. Bahan Ajaran 3. Bogor
- Winarto, B., 2006. *Kamus Rimbawan*. Yayasan Bumi Indonesia Hijau. Jakarta